

RISALAH RAPAT

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : 13.00 – 15.30 WIB
Tempat : KPPIP
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumatera Utara

Peserta : Sekretariat Kabinet;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Kementerian Keuangan;
Kementerian BUMN;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR);
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR;
Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara;
Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
PT Pelabuhan Indonesia I.

Tidak Hadir : Kementerian PUPR (Ditjen. Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol);
Kementerian ESDM (Ditjen. Minyak dan Gas).

Agenda Rapat : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi Sumatera Utara

Pembahasan :

Jalan Tol Medan – Binjai

Permasalahan pengadaan tanah

Kementerian ATR:

- Perlu dikonfirmasi terkait masalah pengadaan tanah apakah terkait dengan Kanwil yang baru atau sebelumnya.
- Kementerian ATR agar melapor kepada Menteri ATR untuk memastikan target pengadaan tanah tuntas (100%).

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

- Terkait tanah, *grant* sultan masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR. Terdapat 378 Kepala Keluarga (KK) yang menggarap lahan di atas tanah Sultan dan mungkin membutuhkan pembayaran uang kerohiman.

Kementerian BUMN:

- Kendala pada seksi I, yaitu di Kota Medan. Seksi II dan III relatif lancar dan tersisa 5 bidang yang belum dibebaskan.

Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi

Permasalahan pengadaan tanah

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

- Seksi IA, pengadaan tanah langsung ditangani oleh PT Jasamarga Kualanamu.
- Seksi VII masih dalam proses konsinyasi di pengadilan.
- Telah dibuat Tim Sekretariat untuk menindaklanjuti pelaksanaan PSN berdasarkan Perpres 3/2016 yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara.

Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi

Permasalahan dampak negatif pembangunan jalan tol terhadap ekonomi wilayah setempat

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

- Tidak ada masalah dengan perekonomian rakyat di sekitar jalan eksisting. Pembangunan jalan tol dapat dipercepat.
- Jalan tol penting untuk dibangun dan memiliki lokasi yang strategis dari aspek keamanan karena berbatasan dengan negara tetangga.

Kementerian BUMN:

- Penetapan Lokasi belum diterbitkan.
- Pembangunan jalan tol dapat ditindaklanjuti.

PT Pelindo I:

- Diharapkan ruas jalan tol dapat terhubung ke kawasan pariwisata Danau Toba.
- Jalan tol terhubung ke area Pelabuhan Kuala Tanjung.

BPIW:

- Terkait dengan jalan tol untuk mendukung kawasan pariwisata Danau Toba, BPIW telah mengembangkan jalan lintas timur dan barat. Rencana pengembangan jalan tol perlu mengacu pada wilayah pengembangan strategis (WPS) BPIW dan akan ditinjau dahulu.
- Jalan-jalan strategis lainnya akan didiskusikan lebih lanjut.

Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Permasalahan penetapan skema pendanaan

KPPIP:

- Pengembangan wilayah memerlukan pembentukan komite atau Badan Otorita dimana keputusan terkait hal ini akan dibahas pada rapat komite tingkat menteri KPPIP pada 15 Juni (tentatif).



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Selain itu, sejalan dengan arahan Bapak Presiden, maka proyek akan melibatkan Pelindo I dengan Dubai Port dan Port of Rotterdam.

Kementerian BUMN:

- Terminal *multipurpose* mulai beroperasi pada semester 2 2017.
- Saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan Port of Rotterdam terkait pembangunan *industrial park* dan Dubai Port terkait operasional pelabuhan.

PT Pelindo I:

- PT Pelindo I juga terlibat dalam pengembangan kawasan industri dan dilakukan paralel dengan pembangunan pelabuhan hub secara bertahap.
- Masih dilakukan perincian terkait kerjasama dengan Port of Rotterdam.
- Pelindo I sebagai *port developer*.
- Dubai Port dapat dilibatkan untuk pengoperasian pelabuhan dan kawasan logistik petikemas.
- Total area yang dibutuhkan adalah 3.000 ha untuk pembangunan PHI dan KI Kuala Tanjung.
- Dalam rangka percepatan, maka sebaiknya diberikan penugasan kepada PT Pelindo I. Selain itu, menimbang Pelabuhan Belawan sebagai satu kesatuan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga sebaiknya dikelola oleh Badan Usaha yang sama.
- PT Pelindo I telah bertemu dengan Kementerian Perhubungan dan BKPM. Hasilnya bahwa sebaiknya diberi penugasan kepada PT Pelindo I sebagai pembangun pelabuhan dan kawasan industri.
- Pembentukan komite pengarah akan sangat baik untuk memudahkan perolehan perizinan dan perlu melibatkan unsur K/L terkait.
- Terkait rencana pengembangan pelabuhan hub melalui sinergi BUMN adalah mengupayakan seluruh BUMN terkait dan bekerjasama dengan badan usaha asing untuk area pelabuhan dan kawasan industri.

Permasalahan konektivitas dengan KEK Sei Mangkei

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

- Telah dilakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak-pihak terkait. Dalam rangka pembangunan *flyover*. Pendanaan akan dialokasikan pada Kementerian PUPR dan pembangunan dilaksanakan di tanah milik PTPN III.

BPIW:

- Sudah dialokasikan pada DIPA Kementerian PUPR karena sudah masuk RKP 2018.
- Selain itu, tengah dilakukan peningkatan jalan di Kabupaten Simalungun (kemajuan mencapai 58%) dan Kabupaten Batubara (kemajuan mencapai 6,9%).

KEK Sei Mangkei

Permasalahan belum adanya insentif terkait pajak/retribusi dari Pemerintah Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- PTPN III sudah berkoordinasi dengan Ditjen. Pajak terkait *tax allowance* namun belum terdapat tindak lanjut.
- Bupati Simalungun berwenang untuk memberikan insentif ini dan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Simalungun terkait arahan Gubernur Sumatera Utara.
- Pembahasan insentif terkait pajak/retribusi dari Pemerintah Daerah akan dibahas pada rapat yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara pada hari Senin, 19 Juni 2017.

Dewan Nasional KEK:

- Pemberian insentif yang dimaksud dalam RATAS adalah insentif dari Pemerintah Daerah.

Permasalahan tingginya harga gas

- Perwakilan yang berwenang atas permasalahan ini tidak hadir.

Permasalahan pengolahan limbah

Kementerian BUMN:

- Akan menyampaikan status perkembangan pada Senin, 12 Juni.

Permasalahan diibutuhkannya akses jalan menuju pelabuhan

- Perwakilan yang berwenang atas permasalahan ini tidak hadir.

KSPN Danau Toba:

Permasalahan belum optimalnya aksesibilitas Bandara Silangit

- Perwakilan yang berwenang atas permasalahan ini tidak hadir.

Permasalahan belum optimalnya aksesibilitas Bandara Kualanamu

Kementerian BUMN:

- Belum mengetahui perkembangannya dari PT Garuda Indonesia. Akan menyampaikan status perkembangan pada Senin, 12 Juni.

Bendungan Lausimeme

Umum

Kemenko Perekonomian:

- Mengingat terdapat risiko keterbatasan anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 (hanya sekitar Rp106 Triliun), maka perlu diadakan diskusi dengan Kementerian PUPR terkait dampak dari anggaran 2018 kepada proyek-proyek PSN di bawah wewenang Kementerian PUPR, termasuk proyek Bendungan Lausimeme.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

Permasalahan pembebasan lahan kawasan hutan

Kemenko Perekonomian:

- Rapat pembahasan rancangan Perpres telah dilakukan pada 8 Juni.
- Setelah diterbitkannya Perpres terkait pembebasan lahan kawasan hutan, maka akan diperlukan peraturan teknis petunjuk pelaksanaan untuk pengimplementasiannya, misalnya dalam bentuk peraturan Menteri ATR.

BPIW:

- Telah dialokasikan dana sebesar Rp7,3 miliar dan kemajuan konstruksi 0,02%

Bappeda Provinsi Sumatera Utara:

- Bendungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung dikeluarkannya Perpres.

Kawasan Industri Medan

Permasalahan belum optimalnya aksesibilitas

BPIW:

- BPIW akan mengoordinasikan hal ini dengan Direktorat Jenderal terkait masalah banjir dan kemacetan.
- Pengembangan KIM merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan.

Permasalahan pengelolaan limbah

KPPIP:

- Akan ditindaklanjuti oleh Kemenko Maritim dan menimbang pengelolaan limbah merupakan wewenang Kementerian PUPR, maka perlu diadakan rapat khusus dengan Kementerian PUPR.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

- Limbah B3 sudah menggunakan mekanisme bisnis sehingga pengelolaannya terbuka untuk umum. Penerbitan izin pengelolaan terdapat pada KLHK.
- Sudah terdapat peta jaringan pengelolaan limbah di seluruh Indonesia.

Permasalahan kepastian pasokan listrik

Kementerian ESDM:

- PLTU Nagan Raya di Aceh hanya memiliki kapasitas daya hanya 50% dari total kapasitas. Selanjutnya, PLTU Pelabuhan Angin di Sumatera Utara, dari 2 hanya beroperasi 1 dengan kapasitas daya hanya 50-60% dari total kapasitas.



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

- Akan ada penambahan pasokan di Sumatera Utara mencapai 1.000 MW dan dilakukan sepanjang tahun 2017-2019. Penambahan ini meliputi penambahan jaringan transmisi dan pembangkit.
- Dengan demikian, kestabilan pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan baru dapat terwujud pada tahun 2019-2020.

Tindak Lanjut :

No.	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Jalan Tol Medan – Binjai	<p>Kementerian BUMN untuk turut memonitor kemajuan pembebasan lahan oleh Kementerian ATR seperti telah disampaikan ke Presiden.</p> <p><i>Tindak lanjut: Rapat pembahasan dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR dan PT Utama Karya.</i></p>	Kementerian ATR	Senin, 12 Juni pukul 11.00 WIB
		<p>Kementerian ATR untuk melaporkan hasil inventarisasi lahan dengan status <i>grant</i> sultan, beserta identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut ganti rugi.</p> <p><i>Tindak Lanjut: Rapat pembahasan dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR dan PT Utama Karya.</i></p>	Kementerian BUMN	Senin, 12 Juni pukul 11.00 WIB
2	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi	<p>Kementerian ATR untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk percepatan pembebasan lahan.</p> <p><i>Tindak lanjut: Rapat pembahasan dengan Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian ATR dan PT Utama Karya.</i></p>	Kementerian ATR	Senin, 12 Juni pukul 11.00 WIB
3	Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi	<p>Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan Pemprov Sumatera Utara untuk melakukan kajian dampak ekonomi dari pembangunan Jalan Tol terhadap ekonomi di wilayah bersangkutan</p> <p><i>Tindak lanjut: Kementerian BUMN mengkonfirmasi kepada PT Utama Karya bahwa pembangunan jalan tol tidak akan berdampak negatif pada ekonomi rakyat di sekitar jalan eksisting.</i></p>	Kementerian BUMN	<i>untuk didiskusikan</i>



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

4	Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung	<p>Menteri Perhubungan untuk menyampaikan status pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung kepada Gubernur Sumut.</p>	Kementerian Perhubungan	<i>untuk didiskusikan</i>
		<p>Penetapan skema pengembangan pelabuhan hub internasional berdasarkan hasil OBC yang telah disusun oleh KPPIP dan telah dibahas dengan pemangku kepentingan.</p> <p><i>Tindak lanjut: Dilaksanakan pembahasan skema pendanaan dan pembentukan komite koordinator pengembangan wilayah pada rapat tingkat menteri KPPIP.</i></p>	KPPIP, Menteri Perhubungan	<i>Tentatif 15 Juni 2017</i>
5	KEK Sei Mangkei	<p>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun dan menerapkan bentuk bentuk insentif yang mungkin untuk KEK Sei Mangkei.</p> <p><i>Tindak lanjut: Rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumut antara Pemkab Simalungun dan Batubara dengan melibatkan Dewan Nasional KEK.</i></p>	Pemprov Sumatera Utara	<i>Senin, 19 Juni</i>
		<p>Rapat koordinasi Kementerian ESDM dan Pemprov Sumut untuk mengidentifikasi opsi penurunan harga gas, misalnya pencantuman KEK Sei Mangkei dalam perubahan Permen ESDM 40/2016.</p> <p><i>Tindak lanjut: Rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumut dengan Kementerian ESDM.</i></p>	Pemprov Sumatera Utara	<i>Senin, 19 Juni</i>



		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian LHK untuk mengusulkan lokasi-lokasi potensial pembangunan IPAL B3 kepada Pemprov • Kementerian BUMN untuk mengkaji kemungkinan BUMN dalam proyek pengembangan IPAL B3 <p>Tindak lanjut: Akan dibahas lebih lanjut antara Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.</p>	Kementerian BUMN	<i>untuk didiskusikan</i>
		<p>Menteri BUMN untuk bersurat dan mengadakan rapat koordinasi dengan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan anggaran DED untuk pembangunan <i>flyover</i> yang dibutuhkan.</p> <p>Tanggapan: Sudah dialokasikan di Kementerian PUPR</p>	Kementerian BUMN	<i>untuk didiskusikan</i>
6	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya	<p>Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kesiapan Bandara Silangit untuk melayani penerbangan internasional.</p> <p>Tidak hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan.</p>	Kementerian Perhubungan	<i>untuk didiskusikan</i>



Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

7	Bendungan Lausimeme	<p>Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan mengkaji kesiapan Bandara Kualanamu melayani penerbangan internasional Tindak lanjut: Kementerian BUMN melaporkan kemajuan kepada KPPIP pada 12 Juni.</p>	Kementerian BUMN	Senin, 12 Juni
		<p>Pembahasan <i>draft</i> Peraturan Presiden dengan pihak Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.</p> <p>Rancangan Perpres telah dibahas pada 8 Juni. Tidak hadir perwakilan dari Ditjen. SDA, Kementerian PUPR. Tindak lanjut: Rapat pembahasan dengan Kementerian PUPR.</p>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<i>untuk didiskusikan</i>
8	Kawasan Industri Medan	<p>Untuk didiskusikan: masalah aksesibilitas, pengolahan limbah, dan kepastian pasokan listrik.</p> <p>Tindak lanjut: Rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumut antara Pemprov Sumut dan Pemkot Medan, khususnya terkait <i>masterplan</i> kawasan.</p>	Pemprov Sumatera Utara	Senin, 12 Juni pukul 11.00 WIB